



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/5966x317>

PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI RELAWAN PRAMUKA PEDULI DALAM TANGGAP DARURAT BANJIR DI KOTA BEKASI

Ari Yudha Caesar Sutikno ^{a*}, Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi Hiram ^b, Justin Bongsoikrama ^c

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Manajemen Bencana; 2234500052@student.budiluhur.ac.id ,Universitas Budi Luhur; Jakarta

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen Bencana, taqwa.putra@budiluhur.ac.id , Universitas Budi Luhur; Jakarta

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen Bencana justin.Bongsoikrama@budiluhur.ac.id · Universitas Budi Luhur Jakarta

*Penulis Korespondensi: Ari Yudha Caesar Sutikno

ABSTRACT

This study analyzes how Pramuka Peduli organizes its operational roles and builds coordination during flood emergency response in Bekasi City. A qualitative single-case study design was employed. Data were collected from three informants representing Pramuka Peduli, the Bekasi City Regional Disaster Management Agency (BPBD), and the community through semi-structured interviews, observation, field notes, and supporting documents. Data were analyzed using five organizational-management categories: organizational management, organizing, command system, inter-organizational cooperation, and volunteer management. The findings show that operational organization begins with initial information and needs assessment, followed by competency-based task allocation, post-based control, and adaptive deployment according to capacity and risk. Coordination is carried out through BPBD, Pusdalops, emergency posts, the disaster risk reduction forum, Basarnas, the Kwarcab network, and other volunteer groups. The study also identifies challenges related to uneven information, overlapping assignments, resource concentration, and the need to maintain competence and volunteer safety when operational demands escalate. The study concludes that the effectiveness of Pramuka Peduli depends on the integration of adaptive internal organization, competency-based deployment, reporting discipline, and cross-organizational coordination within the disaster emergency command system.

Keywords: *Pramuka Peduli; volunteer organization; coordination; emergency respons; floods.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengorganisasian peran operasional dan mekanisme koordinasi Pramuka Peduli dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data diperoleh dari tiga informan yang mewakili Pramuka Peduli Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dan masyarakat melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, catatan lapangan, serta dokumen pendukung. Analisis dilakukan melalui lima kategori, yaitu manajemen organisasi, pengorganisasian, sistem komando, kerja sama antarlembaga, dan manajemen relawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian operasional dimulai dari informasi awal dan asesmen kebutuhan, dilanjutkan dengan pembagian tugas berbasis kompetensi, pengendalian dari posko, serta penempatan anggota secara adaptif sesuai kapasitas dan tingkat risiko. Koordinasi dilakukan melalui BPBD, Pusdalops, posko tanggap darurat, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Basarnas, jaringan Kwarcab, dan unsur relawan lainnya. Tantangan yang ditemukan meliputi ketidakseragaman informasi, potensi tumpang tindih penugasan, konsentrasi sumber daya pada lokasi tertentu, serta kebutuhan menjaga kesesuaian kompetensi dan keselamatan relawan ketika kebutuhan operasi meningkat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas Pramuka Peduli ditentukan oleh integrasi antara pengorganisasian internal yang adaptif, penempatan berbasis kompetensi, disiplin pelaporan, dan koordinasi lintas organisasi dalam sistem komando penanganan darurat bencana.

Kata kunci: Pramuka Peduli; pengorganisasian relawan; koordinasi; tanggap darurat; banjir.

1. PENDAHULUAN

Kota Bekasi secara berulang menghadapi bencana banjir berskala besar yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik. Pada banjir Maret 2025, Pemerintah Kota Bekasi mencatat sekitar 28.152 kepala keluarga atau 86.437 jiwa terdampak di delapan kecamatan dan menetapkan status tanggap darurat pada 4-18 Maret 2025 [1]. Evaluasi pascabencana kemudian memperkirakan total kerugian mencapai sekitar Rp881,79 miliar [2]. Besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa respons darurat tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif organisasi relawan yang terorganisasi di lapangan.

Dalam perspektif ilmu manajemen, penanganan tanggap darurat bukan sekadar aksi kemanusiaan, melainkan persoalan manajerial yang mencakup pengelolaan sumber daya, pembagian tugas, alur komunikasi, dan koordinasi lintas organisasi. Keberadaan organisasi relawan seperti Pramuka Peduli menjadi bagian dari sumber daya sosial yang vital untuk mendukung evakuasi, pendataan, operasional posko, hingga distribusi bantuan. Pramuka Peduli memiliki struktur kelembagaan dan kapasitas dasar yang potensial, namun kontribusi nyatanya sangat bergantung pada bagaimana organisasi tersebut diatur dan diintegrasikan ke dalam sistem komando bencana resmi.

Titik krusial dalam penanggulangan bencana terletak pada kenyataan bahwa hadirnya relawan di lapangan tidak secara otomatis menghasilkan respons yang efektif. Situasi darurat yang dinamis dan melibatkan banyak aktor sering kali memicu masalah operasional, seperti tumpang tindih peran, ketidakjelasan tugas, keterlambatan informasi, dan lemahnya koordinasi dengan BPBD maupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, efektivitas aksi relawan tidak hanya dibentuk oleh semangat membantu, tetapi oleh mekanisme pengorganisasian kerja dan kualitas hubungan antarlembaga yang terbangun saat krisis terjadi.

Meskipun topik relawan dan kebencanaan telah banyak diteliti, masih terdapat tiga celah penelitian (research gap) yang signifikan. Secara konseptual, belum banyak studi yang menjelaskan secara terpadu hubungan antara pengorganisasian peran operasional relawan, koordinasi lintas aktor, dan efektivitas respons lapangan. Secara empiris, kajian yang menempatkan Pramuka Peduli Kota Bekasi sebagai unit analisis manajerial masih sangat terbatas. Sementara secara kontekstual, sebagian besar literatur terdahulu belum sepenuhnya menggambarkan realitas dan dinamika penanganan banjir perkotaan di tingkat lokal Indonesia.

Berdasarkan dinamika dan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pramuka Peduli mengelola peran operasionalnya serta membangun mekanisme koordinasi dengan aktor lain dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi. Berpijak pada sudut pandang ilmu manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur manajemen organisasi relawan dan penanggulangan bencana, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan tata kelola relawan dan koordinasi kebencanaan di Kota Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Hukum Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa tanggap darurat merupakan bagian dari sistem penanggulangan bencana yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi relawan [3].

Secara operasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dalam konteks penelitian ini, batas kajian ditempatkan pada tahap tanggap darurat, yaitu ketika bencana sedang terjadi atau sesaat setelah kejadian yang membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi [4].

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana menjadi dasar untuk memahami mekanisme komando, koordinasi, komunikasi, pengendalian, informasi, dan pelaporan pada fase darurat [5]. Selain itu, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 menekankan

penguatan tata kelola, koordinasi, kapasitas, dan sinergi antarpihak [6]. Berdasarkan landasan hukum tersebut, peran Pramuka Peduli dianalisis melalui kejelasan tahap tanggap darurat, keterhubungan relawan dengan sistem komando, dan kebutuhan koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana di daerah.

2.2 Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi dipahami sebagai proses mengelola struktur, sumber daya manusia, komunikasi, budaya kerja, pengetahuan, dan mekanisme koordinasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam konteks Pramuka Peduli, manajemen organisasi menjadi krusial karena relawan tidak hanya hadir sebagai individu yang ingin membantu, tetapi bergerak melalui wadah organisasi yang memiliki arah kebijakan, pembagian fungsi, dan hubungan kerja dengan pihak eksternal. Dalam penanggulangan bencana, struktur organisasi yang jelas menjadi dasar pembagian tugas, garis komando, dan penentuan tanggung jawab setiap anggota sehingga proses pengambilan keputusan dan koordinasi lapangan dapat berlangsung secara cepat dan terarah.

Selain itu, budaya organisasi yang menanamkan nilai kedisiplinan, kepedulian, gotong royong, kesiapsiagaan, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional berperan penting dalam membentuk perilaku relawan saat menghadapi situasi darurat. Kombinasi antara struktur yang terorganisasi dan budaya organisasi yang kuat memungkinkan Pramuka Peduli bekerja secara efektif, adaptif, serta mampu berkolaborasi dengan BPBD dan organisasi kemanusiaan lainnya.

Beberapa studi mendukung pentingnya aspek ini. Sudarijati, Samsuri, dan Lestari menunjukkan bahwa budaya organisasi dan komunikasi berkaitan dengan kinerja organisasi [7], sedangkan Firdausy dan Lutfi menunjukkan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan mengelola fungsi, struktur, koordinasi, dan sumber daya [8]. Perspektif manajemen organisasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana Pramuka Peduli mampu mengelola anggota, informasi, struktur kerja, dan sumber daya operasional saat tanggap darurat banjir secara terarah, bukan sekadar berdasarkan spontanitas.

2.3 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses menyusun pekerjaan, membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, mengatur hubungan kerja, dan menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam situasi tanggap darurat, pengorganisasian menjadi sangat vital karena pekerjaan di lapangan harus dilakukan dengan cepat, namun tetap memerlukan kejelasan mengenai *siapa melakukan apa, siapa memberi arahan, dan bagaimana antaranggota saling mendukung*.

Pengorganisasian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, pencapaian tujuan, serta pembentukan struktur organisasi [9]. Kusumaningrum, Ahmad, dan Arba juga menunjukkan bahwa desain struktur organisasi berkaitan langsung dengan pembagian kerja, rentang kendali, pendelegasian wewenang, dan kesatuan perintah [10]. Dalam penelitian ini, konsep pengorganisasian digunakan untuk menganalisis pembagian tugas pada Pramuka Peduli, penempatan anggota sesuai kompetensi, pengaturan kerja dari posko, serta kemampuan organisasi menyesuaikan kegiatan dengan perubahan kondisi banjir di lapangan.

2.4 Sistem Komando

Sistem komando dalam penanganan darurat bencana merupakan mekanisme pengendalian operasi yang mengatur komando, koordinasi, komunikasi, pengendalian informasi, dan pelaporan selama keadaan darurat berlangsung. Dalam penelitian ini, sistem komando tidak hanya dimaknai sebagai pemberian perintah dari atasan kepada bawahan, tetapi juga sebagai pola kerja terstruktur yang menghubungkan BPBD dengan relawan Pramuka Peduli agar respons terhadap bencana banjir berjalan secara terarah.

Koordinasi merupakan unsur esensial dalam organisasi tanggap darurat karena menyatukan tujuan antarlembaga dan membantu pencapaian target penanganan secara efektif [11]. Sistem komando juga berperan dalam pemetaan situasi, pendataan korban dan relawan, pengelolaan bantuan, serta penyampaian informasi. Tjahjono menunjukkan bahwa simulasi gladi ruang dan gladi posko dapat memperkuat pemahaman unsur pimpinan dan staf terhadap skenario, peran, fungsi, mekanisme operasional, pengambilan keputusan, dan koordinasi operasi [12]. Konsep sistem komando ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Pramuka Peduli menerima arahan, menyesuaikan tugas, melaporkan kegiatan, dan bekerja mengikuti kebutuhan operasi tanggap darurat banjir di Kota Bekasi. Konsep ini juga digunakan

untuk melihat sejauh mana hubungan kolaboratif antara Pramuka Peduli dengan BPBD, Posko Utama, PUSDALOPS, pemerintah setempat, serta unsur relawan lainnya berjalan secara teratur dan terintegrasi.

2.5 Kerja Sama Antarlembaga

Kerja sama antarlembaga adalah proses membangun hubungan kerja, komunikasi, pembagian peran, penyelarasan tindakan, dan pemanfaatan sumber daya bersama antar-aktor penanggulangan bencana. Kerja sama ini sangat penting karena tidak ada satu pun organisasi yang mampu menangani seluruh kompleksitas kebutuhan darurat secara mandiri. Oleh karena itu, BPBD, relawan, pemerintah setempat, TNI, Polri, Basarnas, Posko, dan masyarakat harus terhubung dalam pola kerja yang saling mendukung.

Aradiansyah, Hayat, dan Ilyas menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanggulangan banjir dipengaruhi oleh dialog, komitmen, kepercayaan, dan pemahaman bersama antaraktor [13]. Putra Pratama, Dewo, dan Rahmat menjelaskan bahwa model pentahelix dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana [14]. Selain itu, Rustinsyah dan Prasetya menunjukkan bahwa pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam respons darurat banjir membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas [15].

Dalam penelitian ini, konsep kerja sama antarlembaga digunakan untuk mengkaji hubungan Pramuka Peduli dengan BPBD, pemerintah setempat, posko bencana, Basarnas, dan organisasi relawan lainnya. Fokus analisisnya tertuju pada bagaimana komunikasi lintas lembaga berlangsung, bagaimana pembagian tugas dilakukan, bagaimana sumber daya dialokasikan, serta bagaimana hambatan koordinasi seperti tumpang tindih penyaluran bantuan dapat diminimalkan.

2.6 Manajemen Relawan

Manajemen relawan adalah proses mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan kapasitas relawan agar mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara terarah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam penanggulangan bencana, relawan tidak hanya dipandang sebagai tenaga sukarela, tetapi juga sebagai bagian dari sumber daya organisasi yang memerlukan pembagian tugas, peningkatan kapasitas, arahan kerja, serta koordinasi dengan lembaga formal kebencanaan agar tidak bergerak secara spontan tanpa arah.

Relawan memegang peranan penting karena terlibat dalam pertolongan, evakuasi, pendataan, distribusi bantuan, operasional posko, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Rahmawati et al. menunjukkan bahwa edukasi mengenai kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, peran relawan, dan pertolongan pertama dapat memperkuat pengetahuan serta kesiapan relawan dalam menghadapi banjir [16]. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian saja tidak cukup; relawan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknis agar dukungan yang diberikan tepat sasaran.

Bagi Pramuka Peduli, manajemen relawan menjadi penting untuk memastikan penempatan anggota sesuai kemampuan, pengalaman, dan kondisi lapangan. Pelatihan Psychological First Aid pada anggota Pramuka Peduli dilaporkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapan dalam menangani dampak psikologis penyintas bencana [17]. Selain kapasitas psikososial, edukasi dan pelatihan emergency first aid juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pertolongan pertama relawan [18]. Penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui edukasi, mitigasi, simulasi, dan penguatan jejaring lintas sektor mendukung kesiapsiagaan relawan [19].

Manajemen relawan juga berkaitan dengan pembentukan kesiapsiagaan berbasis komunitas. Nurcahyani, Damayani, dan Khadijah menunjukkan bahwa relawan berbasis komunitas dapat berperan dalam kesiapsiagaan banjir melalui edukasi, kegiatan lingkungan, dan penguatan perilaku kesiapsiagaan [20]. Dalam penelitian ini, teori manajemen relawan digunakan untuk menganalisis bagaimana Pramuka Peduli mengelola anggota, membagi tugas, memobilisasi personel, menjaga komunikasi internal, serta menyesuaikan perannya dengan arahan BPBD, kondisi posko, dan dinamika kebutuhan lapangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam pengorganisasian peran operasional dan mekanisme koordinasi Pramuka Peduli dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman

proses, pola kerja, pengalaman, serta dinamika koordinasi antaraktor yang terlibat langsung dalam penanganan banjir. Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi pada periode Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026. Unit analisis difokuskan pada mekanisme pengorganisasian relawan Pramuka Peduli, pembagian tugas operasional, sistem koordinasi, serta hubungan kerja antara organisasi relawan, BPBD Kota Bekasi, dan masyarakat dalam tanggap darurat banjir.

Informan penelitian berjumlah tiga orang yang masing-masing mewakili Pramuka Peduli Kota Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kegiatan tanggap darurat banjir, pemahaman terhadap proses pengorganisasian dan koordinasi di lapangan, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan Pramuka Peduli digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme internal organisasi, pembagian tugas, mobilisasi personel, dan koordinasi relawan. Informan BPBD digunakan untuk memperoleh perspektif mengenai sistem komando, koordinasi antarlembaga, serta posisi organisasi relawan dalam penanganan darurat, sedangkan informan masyarakat digunakan sebagai sumber pendukung untuk memahami pengalaman penerima manfaat terhadap pelaksanaan respons di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pengetahuan informan mengenai pengorganisasian relawan, pembagian tugas, sistem komando, komunikasi, dan koordinasi selama tanggap darurat banjir. Observasi dilakukan selama periode penelitian terhadap kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan penanganan banjir, termasuk pola interaksi antaraktor dan pelaksanaan kegiatan operasional. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen yang tersedia, antara lain laporan kegiatan organisasi, surat tugas, dokumentasi kegiatan, foto, dan catatan operasional.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña [21], yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis dimulai dengan menelaah hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung. Data yang relevan kemudian diberi penandaan awal (initial coding), dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, dan dikategorikan ke dalam lima tema analisis, yaitu manajemen organisasi, pengorganisasian, sistem komando, kerja sama antarlembaga, dan manajemen relawan. Selanjutnya, data antarsumber dibandingkan untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, tantangan, dan hubungan antartemuan. Hasil kategorisasi disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks sebelum dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan data dijaga melalui prinsip trustworthiness dengan menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Pramuka Peduli Kota Bekasi, BPBD Kota Bekasi, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan informasi pada waktu yang berbeda selama periode penelitian. Proses ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan meningkatkan kredibilitas interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pramuka Peduli Kota Bekasi

Pramuka Peduli Kota Bekasi merupakan perangkat taktis dan wadah penugasan khusus di bawah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bekasi yang menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat, pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penanggulangan bencana. Dalam konteks tanggap darurat banjir di Kota Bekasi, Pramuka Peduli berperan sebagai organisasi relawan terstruktur yang memiliki jaringan kelembagaan, struktur kepemimpinan, dan pembagian fungsi operasional.

Secara organisatoris, Pramuka Peduli berada di bawah koordinasi Bidang Pengabdian Masyarakat Kwartir Cabang Kota Bekasi. Struktur kerja dibagi ke dalam Divisi Lingkungan, Divisi Peningkatan Kompetensi, Divisi Kebencanaan, dan Divisi Kerja Sama. Dalam kondisi tanggap darurat banjir, Divisi Kebencanaan menjadi unsur utama yang mengonsolidasikan personel, menyiapkan kebutuhan operasional, dan membangun koordinasi dengan BPBD Kota Bekasi, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta unsur relawan lainnya.

Peran operasional Pramuka Peduli dalam penanganan banjir meliputi dukungan posko, mobilisasi personel, evakuasi dan penyelamatan sesuai kompetensi anggota, pendataan masyarakat terdampak, penyediaan

dapur umum dan kebutuhan konsumsi, dukungan transportasi, serta komunikasi dan koordinasi dengan unsur kebencanaan daerah.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dianalisis melalui lima kategori utama, yaitu manajemen organisasi, pengorganisasian, sistem komando, kerja sama antarlembaga, dan manajemen relawan. Kategorisasi tersebut digunakan untuk mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hubungan antara temuan empiris dan kerangka analisis dapat ditelusuri secara lebih sistematis. Data dari Pramuka Peduli dan BPBD menjadi sumber utama dalam menjelaskan proses pengorganisasian dan koordinasi, sedangkan informasi dari masyarakat digunakan sebagai data pendukung sesuai dengan catatan penelitian yang tersedia. Ringkasan hasil kategorisasi disajikan pada Tabel 1.

Kelima kategori analisis tidak berdiri sendiri. Struktur organisasi internal memengaruhi pembagian tugas; pembagian tugas membutuhkan sistem komando yang jelas; sistem komando bergantung pada koordinasi lintas lembaga; sedangkan keseluruhan proses ditopang oleh kapasitas dan pengelolaan relawan. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak hanya menjelaskan praktik yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis faktor pendukung, tantangan, dan keterkaitannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Table 1 Matriks Temuan Penelitian Berdasarkan Kategori Analisis

Kategori Analisis	Temuan Empiris	Sumber Data Utama	Interpretasi dan Keterkaitan Teori
Manajemen Organisasi	Pramuka Peduli memiliki empat divisi. Dalam tanggap darurat, BPBD, Divisi Kebencanaan mengonsolidasikan personel organisasi dan menghubungkan kegiatan dengan BPBD serta unsur kebencanaan lain.	Pramuka Peduli, dokumentasi organisasi	Struktur internal memberikan kejelasan fungsi dan mendukung mobilisasi sumber daya, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada keterhubungan dengan sistem penanganan darurat daerah.
Pengorganisasian	Personel dibagi ke dalam Klaster Evakuasi dan SAR, Dapur Umum dan Konsumsi, Administrasi dan Pendataan, serta Transportasi dan Ambulans. Penempatan didasarkan pada kemampuan dan dapat disesuaikan ketika kebutuhan berubah.	Pramuka Peduli, observasi, dokumentasi kegiatan	Pembagian berbasis kompetensi mendukung efisiensi dan keselamatan. Fleksibilitas memperkuat adaptasi, tetapi redistribusi personel tetap harus memperhatikan kompetensi dan risiko tugas.
Sistem Komando	Informasi dan kebutuhan operasi diarahkan melalui BPBD, BPBD/Pusdalops, diteruskan kepada pimpinan Pramuka Peduli, lalu dioperasionalkan melalui briefing, koordinator lapangan, dan pelaporan.	BPBD, Pramuka Peduli, catatan operasional	Kejelasan alur komando mengurangi tumpang tindih tugas dan menjaga keterhubungan relawan dengan sistem darurat. Tantangan muncul ketika informasi atau arahan tidak diterima secara seragam.
Kerja Sama Antarlembaga	Koordinasi dilakukan melalui BPBD, BPBD, Pusdalops, posko, FPRB, Basarnas, jaringan Kwartar, dan relawan lainnya. Pembagian wilayah dan sumber daya diarahkan untuk mengurangi penumpukan personel pada satu lokasi.	BPBD, Pramuka Peduli, dokumentasi koordinasi	Jaringan yang terbentuk sebelum bencana mempercepat komunikasi dan mobilisasi, tetapi banyaknya aktor meningkatkan risiko perbedaan informasi dan tumpang tindih kegiatan jika koordinasi tidak diperbarui.
Manajemen Relawan	Pengelolaan relawan mencakup peningkatan kapasitas, pelatihan, penempatan berbasis kemampuan, rotasi kerja, serta	Pramuka Peduli, dokumentasi pelatihan/kegiatan	Efektivitas relawan bergantung pada kompetensi, kondisi fisik, pengalaman, keselamatan, dan pengaturan beban kerja; tidak

Kategori Analisis	Temuan Empiris	Sumber Data Utama	Interpretasi dan Keterkaitan Teori
	penggabungan anggota senior dan anggota yang lebih muda atau baru.		hanya pada jumlah personel yang tersedia.

Sumber: Diolah oleh peneliti.

4.2.1 Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi menunjukkan adanya hubungan kerja antara organisasi pemerintah dan organisasi relawan yang saling melengkapi. BPBD Kota Bekasi berperan dalam pengendalian informasi, pengarahan operasi, penentuan kebutuhan penanganan, serta koordinasi lintas unsur kebencanaan. Sementara itu, Pramuka Peduli berperan sebagai organisasi relawan terstruktur yang mendukung pelaksanaan tugas operasional sesuai kapasitas personel dan kebutuhan penanganan. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi relawan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggota yang dapat dikerahkan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menempatkan personel, mengelola informasi, membagi tanggung jawab, dan menyesuaikan kegiatan dengan sistem penanganan darurat daerah.

Secara internal, Pramuka Peduli Kota Bekasi mengelola kegiatan melalui struktur yang berada di bawah Bidang Pengabdian Masyarakat Kwartir Cabang Kota Bekasi. Struktur tersebut terdiri atas Divisi Lingkungan, Divisi Peningkatan Kompetensi, Divisi Kebencanaan, dan Divisi Kerja Sama. Dalam kondisi tanggap darurat banjir, Divisi Kebencanaan memiliki peran dominan dalam mengonsolidasikan personel, menyiapkan kebutuhan operasional, dan menghubungkan kegiatan organisasi dengan BPBD maupun unsur penanggulangan bencana lainnya. Pembagian tersebut menunjukkan adanya diferensiasi fungsi organisasi yang membantu memperjelas tanggung jawab dan mengurangi ketidakpastian peran ketika organisasi menghadapi kondisi darurat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara BPBD Kota Bekasi dan Pramuka Peduli tidak sepenuhnya dibangun melalui pola instruksi yang kaku. Pramuka Peduli tetap memiliki mekanisme pengelolaan internal untuk mengatur anggota dan sumber dayanya, sedangkan arah penugasan di lapangan disesuaikan dengan informasi dan kebutuhan operasi yang dikoordinasikan melalui BPBD, Pusdalops, maupun posko penanganan darurat. Pola ini memperlihatkan kombinasi antara otonomi organisasi relawan dan kebutuhan untuk tetap terintegrasi dengan struktur komando formal.

Dari perspektif manajemen organisasi, pola tersebut konsisten dengan pandangan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kejelasan struktur, pembagian fungsi, alur komunikasi, dan kemampuan mengelola sumber daya [7], [8]. Selain itu, pengelolaan relawan yang terstruktur menuntut kejelasan pendataan, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi selama penugasan [22]. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan struktur internal Pramuka Peduli dan keterhubungannya dengan BPBD menunjukkan bahwa aktivitas kerelawanan tidak semata-mata berjalan berdasarkan spontanitas, tetapi berada dalam kerangka pengelolaan organisasi yang lebih sistematis.

Meskipun demikian, struktur organisasi yang telah terbentuk belum otomatis menghilangkan seluruh persoalan koordinasi. Kondisi tanggap darurat bersifat dinamis sehingga perubahan kebutuhan personel, informasi lokasi terdampak, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan banyak organisasi dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan kerja. Ketika informasi tidak diterima secara seragam atau distribusi sumber daya tidak dikendalikan secara terpadu, tetap terdapat potensi penumpukan personel dan bantuan pada satu lokasi, sementara lokasi lain membutuhkan dukungan lebih besar.

Keterlibatan Pramuka Peduli dalam FPRB Kota Bekasi menjadi salah satu mekanisme yang mendukung integrasi tersebut. Temuan ini memperluas pemahaman manajemen organisasi relawan bahwa efektivitas tidak hanya bergantung pada pengelolaan internal, tetapi juga pada kemampuan membangun keterhubungan kelembagaan dengan sistem penanggulangan bencana daerah. Implikasinya, penguatan manajemen organisasi perlu diarahkan pada konsistensi alur informasi, kejelasan hubungan kerja antara struktur internal dan BPBD, serta mekanisme pembaruan data kebutuhan dan sumber daya selama operasi berlangsung.

4.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi merupakan proses penataan tugas, penempatan personel, dan pengaturan hubungan kerja agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif sesuai kebutuhan lapangan. BPBD Kota Bekasi berperan pada pengorganisasian tingkat makro melalui posko dan Pusdalops, sedangkan Pramuka Peduli menjalankan pengorganisasian internal melalui pembagian fungsi, penetapan koordinator lapangan, dan pengalokasian anggota sesuai kompetensi serta kondisi operasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa personel Pramuka Peduli dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu Klaster Evakuasi dan SAR, Klaster Dapur Umum dan Konsumsi, Klaster Administrasi dan Pendataan, serta Klaster Transportasi dan Ambulans. Pembagian ini menunjukkan penerapan prinsip penempatan personel berdasarkan kompetensi. Dalam situasi tanggap darurat, pendekatan tersebut penting karena setiap jenis tugas memiliki tingkat risiko dan tuntutan keterampilan yang berbeda. Penempatan anggota pada tugas yang sesuai kemampuan dapat mengurangi kesalahan penugasan, meningkatkan efisiensi operasi, dan mendukung keselamatan personel.

Pembagian tugas tidak selalu bersifat tetap. Ketika intensitas banjir atau kebutuhan evakuasi meningkat, personel dari klaster tertentu dapat dialihkan untuk membantu fungsi lain berdasarkan prioritas kebutuhan lapangan. Fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa pengorganisasian Pramuka Peduli bersifat adaptif terhadap perubahan situasi. Namun, perpindahan anggota antarklaster juga menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara kompetensi personel dan jenis tugas apabila pengalihan tidak mempertimbangkan kemampuan teknis dan tingkat risiko, terutama pada evakuasi dan SAR.

Temuan tersebut memperkuat prinsip bahwa pengorganisasian mencakup pembagian kerja, pendelegasian tanggung jawab, kesatuan perintah, dan rentang kendali [9], [10]. Dalam konteks relawan bencana, fleksibilitas perlu dipadukan dengan kesesuaian kompetensi dan pengawasan. Kemampuan adaptasi tidak dimaknai sebagai kebebasan memindahkan personel tanpa batas, tetapi sebagai penyesuaian terkontrol berdasarkan kebutuhan operasi dan kapasitas anggota.

Implikasinya, Pramuka Peduli perlu mempertahankan pembagian kerja berbasis kompetensi sekaligus memperkuat pemetaan kemampuan anggota sebelum penugasan. Daftar kompetensi, pengalaman, dan batas tugas setiap relawan dapat membantu koordinator lapangan ketika melakukan redistribusi personel pada saat terjadi eskalasi kebutuhan. Koordinasi dengan BPBD dan Pusdalops juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan penempatan personel tetap sesuai prioritas penanganan dan tidak menimbulkan tumpang tindih tugas.

4.2.3 Sistem Komando

Sistem komando dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian operasi yang mengatur alur instruksi, pembagian kewenangan, pelaporan, dan koordinasi antarunsur yang terlibat. Sistem komando tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara pemberi dan penerima perintah, tetapi sebagai mekanisme yang menjaga agar pergerakan relawan tetap terhubung dengan kebutuhan operasi dan tidak berjalan terpisah dari sistem penanganan darurat daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bekasi dan Pusdalops berperan dalam penyampaian informasi situasi, penentuan kebutuhan penanganan, serta pengaturan wilayah dan prioritas operasi. Informasi tersebut diteruskan kepada pimpinan Pramuka Peduli untuk ditindaklanjuti melalui konsolidasi internal, briefing personel, penyiapan peralatan, dan penunjukan koordinator lapangan. Koordinator lapangan kemudian mengendalikan personel pada titik penugasan, memantau kondisi serta keselamatan tim, dan menyampaikan laporan perkembangan kepada struktur organisasi dan unsur pengendali operasi.

Pola tersebut menunjukkan penerapan prinsip kesatuan komando dan kejelasan alur pelaporan sebagaimana ditekankan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana [5]. Keberadaan satu jalur koordinasi melalui BPBD, Pusdalops, posko, pimpinan organisasi, dan koordinator lapangan membantu mengurangi risiko tumpang tindih tugas serta memudahkan penyesuaian penempatan personel. Literatur juga menempatkan koordinasi dan latihan sistem komando sebagai unsur penting dalam penyatuan tujuan dan peningkatan kesiapan organisasi darurat [11], [12].

Meskipun demikian, penerapan sistem komando pada organisasi relawan menghadapi tantangan karena relawan memiliki mekanisme internal sementara BPBD mempunyai otoritas dalam sistem penanganan darurat daerah. Kondisi tersebut membutuhkan batas kewenangan dan jalur komunikasi yang jelas. Apabila informasi tidak diterima secara seragam atau arahan datang dari beberapa aktor secara bersamaan, potensi perbedaan penugasan dan kebingungan di tingkat lapangan tetap dapat terjadi.

Implikasinya, BPBD dan Pramuka Peduli perlu memperkuat penyampaian instruksi satu pintu, format pelaporan yang seragam, serta briefing dan pembaruan situasi secara berkala. Penetapan jalur komunikasi yang jelas antara Pusdalops, pimpinan organisasi, dan koordinator lapangan penting untuk memastikan bahwa pergerakan relawan tetap berada dalam satu kerangka komando penanganan darurat.

4.2.4 Kerja Sama Antarlembaga

Kerja sama antarlembaga merupakan unsur penting dalam tanggap darurat banjir karena kompleksitas kebutuhan lapangan tidak dapat ditangani oleh satu organisasi secara mandiri. Dalam konteks Kota Bekasi, kerja sama melibatkan BPBD, Pramuka Peduli, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Basarnas, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, serta unsur relawan lainnya. BPBD mempunyai posisi penting sebagai penghubung dan pengarah koordinasi agar keterlibatan berbagai aktor dapat diarahkan pada kebutuhan operasi yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Pramuka Peduli dan lembaga lainnya dilakukan terutama melalui BPBD, Pusdalops, posko tanggap darurat, serta FPRB Kota Bekasi. Keberadaan FPRB memberikan ruang komunikasi bagi organisasi relawan untuk bertukar informasi, menyelaraskan kegiatan, dan membahas pembagian wilayah serta kebutuhan penanganan. Mekanisme tersebut membantu Pramuka Peduli memperoleh informasi mengenai lokasi terdampak, kebutuhan personel, dan bentuk dukungan yang diperlukan sebelum pengerahan anggota.

Pembagian wilayah kerja dan fungsi antarorganisasi menjadi aspek penting karena tanpa pembagian penugasan yang jelas terdapat risiko konsentrasi relawan dan bantuan pada lokasi yang mudah dijangkau, sementara wilayah lain menerima dukungan lebih terbatas. Koordinasi antarlembaga karena itu berfungsi sebagai mekanisme distribusi sumber daya, bukan hanya sebagai sarana komunikasi.

Temuan ini sejalan dengan collaborative governance yang menekankan dialog, komitmen, kepercayaan, dan pemahaman bersama [13], serta dengan pendekatan pentahelix yang menekankan sinergi lintas sektor [14]. Studi lain mengenai respons banjir juga menunjukkan pentingnya keterlibatan dan pembagian peran pemangku kepentingan [15]. Dalam penelitian ini, jaringan yang telah terbentuk sebelum bencana menjadi faktor pendukung karena mempercepat komunikasi dan mobilisasi, sedangkan banyaknya aktor menjadi tantangan jika pembaruan situasi dan pembagian tugas tidak dilakukan secara konsisten.

Implikasinya, koordinasi perlu diperkuat sebelum, selama, dan setelah operasi. Sebelum bencana, penguatan dapat dilakukan melalui pertemuan dan latihan bersama; selama tanggap darurat diperlukan pembagian sektor, pembaruan informasi situasi, dan pelaporan sumber daya yang jelas; sedangkan setelah operasi diperlukan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi hambatan dan memperbaiki pembagian peran pada penanganan berikutnya.

4.2.5 Manajemen Relawan

Manajemen relawan dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi merupakan proses pengelolaan personel yang mencakup pembinaan kapasitas, penempatan berdasarkan kompetensi, pengaturan waktu kerja, perlindungan keselamatan, dan pengembangan pengalaman anggota. Dalam konteks Pramuka Peduli, relawan tidak hanya diposisikan sebagai tenaga sukarela yang siap dikerahkan, tetapi sebagai sumber daya organisasi yang harus dikelola agar mampu menjalankan tugas secara aman, terarah, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas relawan dilakukan melalui pembekalan yang relevan dengan kebutuhan penanganan bencana, antara lain teknik pertolongan di air, prosedur evakuasi kelompok rentan, pengelolaan data bencana, Emergency First Aid, dan Psychological First Aid. Literatur mendukung pentingnya edukasi relawan mengenai kesiapsiagaan dan kegawatdaruratan [16], peningkatan

kapasitas psikososial melalui PFA [17], pelatihan pertolongan pertama [18], serta penguatan kapasitas relawan melalui edukasi, simulasi, dan jejaring lintas sektor [19].

Selain kompetensi, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaturan sistem kerja untuk menjaga daya tahan personel. Pramuka Peduli menerapkan rotasi antara waktu bertugas dan waktu istirahat di posko. Organisasi juga menggabungkan anggota senior dengan anggota yang lebih muda atau baru dalam satu tim. Pola ini berfungsi sebagai mekanisme transfer pengetahuan, pengawasan keselamatan, dan pendampingan selama operasi. Peran relawan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesiapsiagaan juga ditunjukkan dalam penelitian lain [20].

Tantangan muncul ketika kebutuhan personel meningkat secara cepat. Dalam situasi tersebut, organisasi harus mampu menambah atau mengalihkan personel tanpa mengabaikan kompetensi dan kondisi fisik anggota. Kebutuhan respons yang tinggi dapat meningkatkan risiko kelelahan, ketidaksesuaian penempatan, atau berkurangnya waktu pemulihan apabila rotasi tidak dikelola dengan baik.

Implikasinya, Pramuka Peduli perlu memperkuat pendataan kompetensi dan pengalaman anggota, pengaturan rotasi yang konsisten, serta evaluasi pascapenugasan. Latihan berkala bersama BPBD penting untuk memastikan kemampuan relawan tetap sesuai kebutuhan operasi. Pemantauan kondisi fisik dan beban kerja juga perlu menjadi bagian dari pengelolaan personel agar efektivitas respons tidak dicapai dengan mengorbankan keselamatan relawan.

4.3 Implikasi Praktis dan Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi relawan dalam tanggap darurat banjir tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang dapat dikerahkan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pembagian tugas, menempatkan anggota sesuai kompetensi, membangun alur komunikasi, mengikuti sistem komando, dan menjaga koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi BPBD Kota Bekasi dan Pramuka Peduli dalam memperkuat pengelolaan relawan sebagai bagian dari sistem penanganan darurat daerah.

Secara praktis, koordinasi antara BPBD dan organisasi relawan perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi dan penugasan yang jelas sejak tahap awal operasi. Informasi mengenai kondisi wilayah terdampak, kebutuhan personel, prioritas penanganan, dan distribusi sumber daya perlu disampaikan melalui jalur koordinasi yang konsisten agar tidak terjadi perbedaan arahan, tumpang tindih penugasan, maupun penumpukan relawan pada lokasi tertentu. Pusdalops, posko tanggap darurat, dan FPRB dapat dioptimalkan sebagai ruang pertukaran informasi dan penyelarasan kegiatan antaraktor.

Pengelolaan relawan juga perlu didukung pemetaan kompetensi anggota secara sistematis. Informasi mengenai kemampuan teknis, pengalaman penugasan, pelatihan yang pernah diikuti, dan kesiapan anggota dapat menjadi dasar penempatan personel, terutama pada tugas berisiko tinggi. Latihan dan simulasi bersama antara BPBD, Pramuka Peduli, dan unsur relawan lainnya juga perlu dilakukan untuk memperkuat pemahaman terhadap alur komando, komunikasi lapangan, pembagian sektor, dan prosedur pelaporan.

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen kebencanaan dengan menempatkan organisasi relawan bukan hanya sebagai unsur pendukung operasi, tetapi sebagai organisasi yang memiliki struktur internal, mekanisme pengelolaan personel, dan hubungan kelembagaan dengan sistem penanggulangan bencana daerah. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terpadu antara pengorganisasian internal relawan dan koordinasi eksternal dalam konteks tanggap darurat banjir perkotaan di Kota Bekasi. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas relawan merupakan hasil interaksi antara struktur organisasi, kompetensi anggota, sistem komando, jejaring koordinasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan lapangan.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada Pramuka Peduli Kota Bekasi dalam konteks tanggap darurat banjir di Kota Bekasi. Oleh karena itu, temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik terhadap seluruh organisasi relawan atau wilayah penanggulangan bencana di Indonesia. Penelitian melibatkan tiga informan yang mewakili Pramuka Peduli Kota Bekasi, BPBD Kota Bekasi, dan masyarakat. Jumlah tersebut memungkinkan diperolehnya perspektif

organisasi relawan, pemerintah, dan masyarakat, tetapi belum mencakup seluruh aktor yang terlibat, seperti organisasi relawan lainnya, pemerintah kecamatan atau kelurahan, Basarnas, TNI, Polri, serta lembaga sosial dan kemanusiaan lainnya.

Dokumentasi data wawancara tidak tersedia secara sama lengkap untuk seluruh informan. Wawancara dengan masyarakat tidak memiliki transkrip tertulis lengkap, sehingga pemanfaatannya dalam analisis dibatasi pada informasi yang masih didukung oleh catatan penelitian yang tersedia. Data masyarakat digunakan sebagai informasi pendukung dan tidak menjadi satu-satunya dasar penarikan kesimpulan.

Periode penelitian berlangsung dari Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, sehingga temuan menggambarkan dinamika pengorganisasian dan koordinasi dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, sebagai penelitian kualitatif, proses interpretasi tetap melibatkan pertimbangan peneliti dalam pemilihan, pengelompokan, dan pemaknaan informasi. Upaya mengurangi potensi bias dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian peran operasional Pramuka Peduli dalam tanggap darurat banjir di Kota Bekasi dilaksanakan melalui pembagian tugas berbasis kompetensi, pengelolaan personel, pengendalian kegiatan melalui posko, serta penyesuaian penugasan berdasarkan kebutuhan lapangan. Peran tersebut meliputi dukungan evakuasi dan penyelamatan, pengelolaan dapur umum, administrasi dan pendataan, transportasi dan ambulans, serta operasional posko. Pelaksanaannya didukung oleh koordinasi dengan BPBD Kota Bekasi, Pusdalops, FPRB, Basarnas, jaringan Kwartir Cabang, dan unsur relawan lainnya dalam pengaturan wilayah kerja, distribusi personel, pertukaran informasi, serta pengelolaan sumber daya. Meskipun demikian, perbedaan informasi, ketidaksamaan arahan, dan potensi tumpang tindih penugasan masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi. Berdasarkan lima kerangka analisis yang digunakan, efektivitas Pramuka Peduli tidak hanya ditentukan oleh kesiapan individu dan jumlah personel, tetapi juga oleh keterpaduan struktur organisasi, kompetensi anggota, sistem komando, jejaring koordinasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola organisasi relawan yang terstruktur dan terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, BPBD Kota Bekasi dan Pramuka Peduli perlu memperkuat mekanisme koordinasi satu pintu melalui pembaruan informasi secara berkala, pembagian tugas yang jelas, serta pengelolaan sumber daya yang terintegrasi. Penguatan kapasitas anggota juga perlu dilakukan melalui pemetaan kompetensi, pelatihan dan simulasi bersama, serta evaluasi pascapenugasan untuk meningkatkan kesiapan dan efektivitas respons darurat. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan organisasi dan wilayah melalui pendekatan multi-kasus, kuantitatif, atau metode campuran guna mengukur efektivitas koordinasi, kesiapan relawan, kecepatan respons, dan kualitas pelayanan darurat. Hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model koordinasi relawan yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan sistem komando penanggulangan bencana daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Kota Bekasi, "Rakor Evaluasi Banjir Kota Bekasi Bahas Pemulihan Pasca-Banjir." 2025. Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: <https://bekasikota.go.id/detail/rakor-evaluasi-banjir-kota-bekasi-bahas-pemulihan-pasca-banjir>
- [2] Pemerintah Kota Bekasi, "Kota Bekasi Masuki Transisi Pasca Bencana, Fokus Pemulihan Infrastruktur." 2025. Accessed: Oct. 03, 2026. [Online]. Available: https://kec-rawalumbu.bekasikota.go.id/User/berita%5C_detail/7217
- [3] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana." 2007. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- [4] P. R. Indonesia, *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA*, vol. 3, no. 2. 2008. [Online]. Available: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- [5] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana." 2016. [Online]. Available: <https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-3-tahun-2016>
- [6] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang

- Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.” 2025. [Online]. Available: <https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perban-nomor-1-tahun-2025>
- [7] Sudarijati, Samsuri, and S. U. Lestari, “Kinerja organisasi berbasis budaya organisasi dan komunikasi,” *J. Visionida*, vol. 7, no. 2, pp. 133–142, 2021, [Online]. Available: <https://ojs.unida.info/index.php/Jvs/article/view/4898>
- [8] B. M. Firdausy and A. Lutfi, “Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Aset Kota: Studi Badan Keuangan Daerah Kota Depok,” *J. PolGov*, vol. 5, no. 2, pp. 49–78, 2023, doi: 10.22146/polgov.v5i2.5344.
- [9] G. A. M. Putri, S. P. Maharani, and G. Nistrina, “Literature view pengorganisasian: SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi,” *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 3, no. 3, pp. 286–299, 2022, doi: 10.31933/jemsi.v3i3.819.
- [10] H. Kusumaningrum, I. B. Q. Ahmad, and I. A. Arba, “Desain dan struktur organisasi manajemen pendidikan yang efektif di perguruan tinggi,” *Faizi J. Hukum, Polit. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 60–71, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.zarilgapari.org/index.php/faizi/article/download/93/162>
- [11] A. A. Akbar, H. Dwiningtias, and H. K. Rahmat, “Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka,” *J. Curr. Res. Disaster Response Emerg. Manag. e-ISSN xxxx-xxx*, vol. 1, no. 1, pp. 15–20, 2024.
- [12] B. Tjahjono, “Analisis aspek-aspek penyelenggaraan simulasi gladi ruang dan gladi posko penanganan darurat bencana di Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB,” *J. Widyaiswara Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 27–38, 2024, doi: 10.56259/jwi.v5i03.115.
- [13] F. A. Ardiansyah, Hayat, and T. R. Ilyas, “Collaborative governance dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang),” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 7, no. 2, pp. 278–283, 2024, doi: 10.31334/transparansi.v7i2.4001.
- [14] J. P. Pratama, L. P. Dewo, and H. K. Rahmat, “Model sinergitas Pentahelix dalam rangka pengurangan risiko bencana di Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka,” *J. Curr. Res. Disaster Response Emerg. Manag.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.hakhara-institute.com/DREM/article/view/20>
- [15] Rustinsyah and D. A. Prasetya, “Stakeholders engagement in emergency response of flood disasters management in District Ijen, Bondowoso Regency, Indonesia,” *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 18, no. 2, pp. 149–164, 2023, doi: 10.20473/jsd.v18i2.2023.149-164.
- [16] I. Rahmawati *et al.*, “Edukasi pada Relawan Bencana di Indonesia dalam Kesiapsiagaan dan Kegawatdaruratan Menghadapi Bencana Banjir melalui Webinar,” vol. 3, no. 2, pp. 68–74, 2024.
- [17] D. Lusiria, M. Pratama, and N. A. Erlin, “Pelatihan Psychological First Aid (PFA) untuk Meningkatkan Mitigasi Bencana Anggota Pramuka Peduli Kwarcab Kota Payakumbuh,” *J. SOLMA*, vol. 14, no. 1, pp. 942–949, 2025, doi: 10.22236/solma.v14i1.16771.
- [18] S. Suarniati, A. N. Anna. AS, A. T. Padad, and F. Hasanuddin, “Penguatan kapasitas relawan penanggulangan bencana melalui edukasi emergency first aid,” *J. Inov. Has. Pengabd. Masy.*, vol. 7, no. 3, pp. 616–626, 2024, doi: 10.33474/jipemas.v7i3.22096.
- [19] S. Sriyono and others, “Peningkatan kapasitas relawan siaga bencana desa dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusantara*, vol. 6, no. 1, pp. 1096–1106, 2025, doi: 10.55338/jpkmn.v6i1.5402.
- [20] H. Nurcahyani, N. A. Damayani, and U. L. S. Khadijah, “Peran Relawan Pecinta Alam Pameungpeuk (Repalapa) dalam kesiapsiagaan bencana banjir,” *KACANEGARA J. Pengabd. pada Masy.*, vol. 8, no. 3, p. 307, 2025, doi: 10.28989/kacanegara.v8i3.2745.
- [21] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2018. doi: <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-data-analysis-4-246128>.
- [22] C. A. Keumala, J. H. Prakoso, D. Utami, and R. Handayani, “Sosialisasi peran relawan penanggulangan bencana (Studi kasus pada Gempa Cianjur 2022),” *J. Pengabd. Masy. AbdiMas*, vol. 10, no. 5, pp. 319–325, 2024, doi: 10.47007/abd.v10i05.7944.